



**AKSESIBILITAS KELUARGA MISKIN  
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
ACCEPTABILITY FOR POOR FAMILY IN NATIONAL HEALTH  
ASSURANCE PROGRAM**

**A. Nururrochman Hidayatullah dan Tri Gutomo**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)  
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia  
HP. +6285643885019, HP. +6281227178474

*Email: anhidayatullah79@gmail.com, Email: trigutomo61@gmail.com*

Diterima 12 Oktober 2017, direvisi 10 November 2017 disetujui 5 Desember 2017

**Abstract**

*The study reveal, the implementation of poor household accessibility in social security program through national health insurance program (BPJS). Study location was in Purworejo regency, Central Java province. The research was conducted by qualitative method and analyzed descriptively. Primary data comes from informants of poor recipient of the program, the implementer of the programs, puskesmas and implementing bpjs. Secondary data is obtained through field observation, document review and some relevant rules. Data was collted by interviews BPJS officers, health officers, social service agency officials, Central Local Health use his public healt center officers, and poor service receiptents. The study shows that the poors are participants of social health insurance through monthly subscription . They prefer to access puskesmas as another service facility. Accessibility of the poor are easy to reach health services as participants increase significantly day by day. The limited knowledge of the poor are dis matched with the ability of implementers in carrying out BPJS socialization more thoroughly. The poor have not fully understood. It is recommended to update and synchronize integrated data of poor people every three months by doing coordination in social, health institution, BPJS organizer, and placing BPJS officers at the health-care facility as an informant for the poors.*

**Keywords:** Accessibility, National Health Insurance, Poor People

**Abstrak**

Penelitian ini mengungkap implementasi aksesibilitas rumah tangga miskin dalam program jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Lokasi Penelitian di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data primer berasal dari informan yaitu masyarakat miskin penerima program, pelaksana program yaitu puskesmas dan pelaksana BPJS. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, telaah dokumen dan beberapa peraturan yang relevan. Pengumpulan data melalui wawancara kepada petugas BPJS, Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas dan Masyarakat Miskin pengguna layanan. Hasil penelitian mungungkap bahwa masyarakat miskin merupakan peserta jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran. Masyarakat miskin lebih suka mengakses puskesmas sebagai fasilitas layanan lainnya. Aksesibilitas masyarakat miskin memiliki kemudahan dalam menjangkau pelayanan kesehatan terbukti dengan kenaikan kunjungan yang cukup signifikan. Keterbatasan pengetahuan masyarakat miskin belum diimbangi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan sosialisasi secara lebih menyeluruh. Masyarakat miskin belum sepenuhnya memahami. Rekomendasi diupayakan perlu adanya update dan sinkronisasi data terpadu terhadap jumlah masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali dengan melakukan koordinasi melalui Instansi Sosial

540 orang berasal dari kepala keluarga miskin teregister dan 60 orang kepala keluarga miskin non-register atau yang belum mendapat program. Teknik pengumpulan data digunakan kuesioner, panduan wawancara, panduan pengamatan, dan telaah dokumen yang relevan. Data dan informasi yang dijaring secara kuantitatif diolah secara komputasi dengan menggunakan program excel dan statistik SPSS versi 17.00 for Windows, serta pengujian konstruk kemiskinan menggunakan *confirmatory faktor analysis* dengan bantuan program LISREL 8.4, hasilnya dideskripsikan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dimensi budaya memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam membentuk kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Hasil tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, yang masih mengedepankan nilai sosial budaya dalam kehidupansehari-hari. Nilai tersebut, seperti kuatnya semangat gotong royong, hubungan kekerabatan, kebiasaan melakukan musyawarah dalam memutuskan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diketahuinya faktor determinan penyebab kemiskinan di Sulawesi Selatan, intervensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan lebih dititikberatkan pada penyadaran masyarakat tentang berbagai kebiasaan yang sudah menjadi budaya dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Penyuluhan dan bimbingan sosial tentang hidup hemat, tidak mengada-ada, dan menolong semampunya perlu lebih sering dilakukan dengan tidak meninggalkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan. Perlu diupayakan pula penumbuhan keberdayaan masyarakat untuk terciptanya kemandirian masyarakat, karena masyarakat akan memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya sosial, ekonomi, dan politik agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.